

**LAPORAN AKHIR**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN**



**Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pelayanan Publik untuk Mencegah  
Korupsi di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya**

**Tim Pengusul:**

**DR. DODIK WAHYONO, S.H., M.HUM.**

**GESA BIMANTARA, S.H., M.H.**

**NELI AGUS TINA, S.H.**

**Nomor Kontrak**

**010/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025**

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026*

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Pengabdian** : Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pelayanan Publik untuk Mencegah Korupsi di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
2. **Ketua**
  - a. Nama Peneliti : Dr. Dodik Wahyono, S.H, M.M, M.Hum
  - b. NIDN : 0717077106
  - c. Program Studi : Hukum
  - d. E-mail : [dodikwahyono71@gmail.com](mailto:dodikwahyono71@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
3. **Anggota 1**
  - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Gesa Bimantara, S.H., M.H.
  - b. NIDN/NIM : 5258775676130193
  - c. Program Studi : Hukum
  - d. E-mail : [gesabimantara1@gmail.com](mailto:gesabimantara1@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- Anggota 2**
  - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Neli Agus Tina, S.H.
  - b. NIDN/NIM : -
  - c. Program Studi : -
  - d. E-mail : [neliagustina766@gmail.com](mailto:neliagustina766@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
4. Jangka Waktu Pengabdian : 5 bulan
6. Lokasi Pengabdian : Kelurahan Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya
7. Dana Diusulkan : Rp.2.000.000,-

Bojonegoro, 26 Februari 2026

**Mengetahui,**  
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

**Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.**  
NIDN. 07 2108 8601

**Dr. Dodik Wahyono, S.H. M.M. M.Hum.**  
NIDN. 0717077106

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala rahmat kemurahan-Nya selalu mencurahkan rahmat serta kasih sayangnya yang begitu besar sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih di bidang keilmuan agar memberi manfaat sebaik-baiknya terhadap sesama manusia, karena dalam islam dijelaskan sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami bermaksud untuk berperan aktif dalam upaya menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan judul: **Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pelayanan Publik untuk Mencegah Korupsi di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya**. Kami berharap kegiatan yang kami laksanakan dengan mendapatkan kesempatan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bojonegoro pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026 yang bertujuan agar seluruh masyarakat dapat memiliki Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pelayanan Publik untuk Mencegah Korupsi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Isu dan Fokus Pengabdian.....	1
1.2. Lokasi Pendampingan.....	2
<b>BAB II SOLUSI PERMASALAHAN .....</b>	<b>3</b>
2.1. Solusi Permasalahan .....	3
2.2. Riset Terdahulu .....	4
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>5</b>
3.1. Teknik Pendampingan .....	5
3.2. Strategi Yang Digunakan.....	6
3.3. Tahapan Pendampingan.....	7
<b>BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>9</b>
5.1. Hasil Pendampingan .....	9
5.2. Pembahasan.....	11
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
5.1. Kesimpulan .....	13
5.2. Saran .....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul : Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pelayanan Publik untuk Mencegah Korupsi di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

Bidang Keilmuan : Hukum

Nomor Kontrak : 010/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025

Nama Ketua : Dr. Dodik Wahyono, S.H, M.M, M.Hum.

NIDN Ketua : 0717077106

SINTA ID Ketua : 6948048

Nama Anggota 1 : Gesa Bimantara, S.H., M.H.

NIDN Anggota 1 : 5258775676130193

SINTA ID Anggota 1 : 6948048

Nama Anggota 2 : Neli Agus Tina, S.H.

NIM : -

Tahun Usulan : 2025

Tahun Pelaksanaan : 2025

### **Luaran Wajib**

Alamat OJS : <https://journal.unram.ac.id/index.php/darmadiksani/id>

Nama OJS : Darma Diksani : Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora

Volume dan Issue : -

ISSN : 2798-6799

Tahun Publikasi : 2026

Peringkat Akreditasi : 4

## ABSTRAK

Korupsi dalam pelayanan publik tetap menjadi tantangan serius yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu strategi efektif untuk mencegah korupsi adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyampaian pelayanan publik. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, dan partisipasi aktif warga Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dalam memantau pelayanan publik untuk mencegah praktik korupsi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan partisipatif yang melibatkan anggota masyarakat dan pejabat pemerintah daerah. Kegiatan ini berfokus pada edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta memperkenalkan mekanisme yang tepat untuk melaporkan indikasi maladministrasi dan korupsi dalam pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari program ini meliputi pembentukan Forum Pengawasan Pelayanan Publik sebagai platform kolaborasi antara warga dan pejabat daerah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan berbasis masyarakat, dan peningkatan transparansi dan komunikasi dalam penyampaian pelayanan publik. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat menumbuhkan lingkungan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan partisipatif di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Selain itu, model pendampingan ini diharapkan dapat menjadi praktik terbaik yang dapat direplikasi di bidang lain sebagai pendekatan berbasis komunitas untuk pencegahan korupsi.

**Kata Kunci: Layanan Publik, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pencegahan Korupsi, Transparansi.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Isu dan Fokus Pengabdian**

Korupsi merupakan salah satu masalah mendasar yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada level tinggi pemerintahan, tetapi juga kerap muncul di tingkat pelayanan publik, di mana masyarakat berinteraksi langsung dengan aparatur negara. Dalam konteks ini, pengawasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi salah satu elemen penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat hanya dapat terwujud apabila terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam prosesnya (Destamara, 2024).

Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah perkotaan yang memiliki dinamika sosial dan aktivitas pelayanan publik yang tinggi. Sebagai daerah yang cukup strategis di pusat kota, berbagai bentuk pelayanan public seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, bantuan sosial, hingga pengelolaan fasilitas umum, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari aparatur kelurahan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi pelayanan publik, serta minimnya kesadaran akan mekanisme pelaporan jika terjadi indikasi penyimpangan atau praktik koruptif (Raifangga et al., 2025).

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya dalam membangun zona integritas dan sistem pelayanan berbasis digital untuk mencegah korupsi. Namun, upaya tersebut belum akan efektif tanpa keterlibatan langsung masyarakat sebagai pengawas sosial (*social control*). Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik, sekaligus memperkuat nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan kelurahan (Rafid et al., 2024).

Fokus utama dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran

hukum dan peran aktif Pemerintah di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dalam pencegahan Korupsi yang dilakukan oleh Pelayan Publik. Pengabdian ini mengintegrasikan pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif yang melibatkan pelayan publik secara langsung dalam diskusi dan sosialisasi hukum terkait pencegahan Korupsi yang dilakukan oleh Pelayan Publik.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbentuknya pemahaman kolektif masyarakat tentang pentingnya pelayanan publik yang berintegritas serta adanya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam membangun komunikasi efektif dengan Pelayan Publik (Ferico et al., 2020). Kegiatan ini juga diharapkan mendorong kolaborasi antara tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bebas dari korupsi.

## **1.2 Lokasi Pendampingan**

Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah: Kelurahan menyatakan kesediaannya menjadi mitra pengabdian masyarakat, dan sangat membutuhkan upaya penguatan dan peningkatan secara kelembagaan pada Kelurahan. Berikut ini merupakan logo yang dimiliki oleh Kelurahan Kalijudan.

## **BAB II**

### **SOLUSI PERMASALAHAN**

#### **2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan**

Solusi permasalahan yang direncanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pembinaan. Kelurahan menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi dan modernisasi mengancam ketentraman masyarakat. Di sinilah Penguatan Kelurahan masuk, ibarat tambal sulam yang menyegarkan kembali semangat pelestarian Lingkungan Masyarakat (Suripatty et al., 2023). Dengan memperkuat Kelurahan, kita memastikan bahwa lingkungan masyarakat agar jadi lebih tentram dan aman, di antaranya adalah:

1. Sosialisasi Anti-Korupsi dan Etika Pelayanan Publik: Kegiatan ini dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal, termasuk menginisiasi kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dan Etika Pelayanan Publik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
2. Pelatihan Pengawasan Partisipatif Masyarakat: Sangat penting untuk memperkuat peran mereka sebagai penjaga ketentraman lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, insentif, dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pencegahan korupsi.
3. Pendampingan dan Pembentukan Forum Pengawasan Warga: Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan, tim pengabdian akan mendampingi masyarakat dan aparatur kelurahan untuk membentuk Forum Pengawasan Pelayanan Publik di tingkat kelurahan. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara warga dan pemerintah kelurahan dalam menyampaikan aspirasi dan laporan pengaduan masyarakat secara tertib.
4. Monitoring dan Evaluasi Pendampingan: Tim pengabdian akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan melalui survei kepuasan masyarakat, wawancara, dan observasi langsung terhadap perubahan perilaku maupun peningkatan transparansi di lingkungan kelurahan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan kolaborasi positif antara warga dan aparatur kelurahan.

5. Publikasi dan Rekomendasi Kebijakan Lokal: Sebagai hasil akhir, kegiatan ini akan menghasilkan laporan rekomendasi kepada pihak Kelurahan Kalijudan dan Pemerintah Kota Surabaya mengenai langkah-langkah strategis untuk memperkuat integritas pelayanan publik di tingkat kelurahan. Hasil kegiatan juga akan diseminasi melalui media kampus, publikasi lokal, dan forum masyarakat agar dampaknya dapat berkelanjutan

## **2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan**

Riset terdahulu dan teori yang relevan dalam mendukung penguatan dan pembinaan kelembagaan pada kelurahan telah banyak dilakukan oleh subjek hukum. Riset yang dilakukan oleh Suryaningrum (Hukum et al., 2024), dalam artikel yang berjudul: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Zona Integritas, dalam artikel riset tersebut diperoleh sebuah kesimpulan bahwa penguatan kelurahan yang berbasis pelatihan dan pendampingan dengan menerapkan metode workshop dan FGD mampu memperkuat kepengurusan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, menerapkan hukum serta berjalannya tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagai wadah penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Teknik Pendampingan**

Teknik pendampingan yang telah dilakukan oleh penyuluh terhadap mitra dalam kerja sama pengabdian masyarakat ini secara sistematis dimulai dari melaksanakan kegiatan mendasar hingga kegiatan lanjutan, yaitu:

1. Melakukan Sosialisasi Anti-Korupsi dan Etika Pelayanan Publik: Kegiatan ini dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal, termasuk menginisiasi kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dan Etika Pelayanan Publik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
2. Pelatihan Pengawasan Partisipatif Masyarakat: Sangat penting untuk memperkuat peran mereka sebagai penjaga ketentraman lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, insentif, dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pencegahan korupsi.
3. 3. Pendampingan dan Pembentukan Forum Pengawasan Warga: Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan, tim pengabdian akan mendampingi masyarakat dan aparatur kelurahan untuk membentuk Forum Pengawasan Pelayanan Publik di tingkat kelurahan. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara warga dan pemerintah kelurahan dalam menyampaikan aspirasi dan laporan pengaduan masyarakat secara tertib.
4. Monitoring dan Evaluasi Pendampingan: Tim pengabdian akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan melalui survei kepuasan masyarakat, wawancara, dan observasi langsung terhadap perubahan perilaku maupun peningkatan transparansi di lingkungan kelurahan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan kolaborasi positif antara warga dan aparatur kelurahan
5. Publikasi dan Rekomendasi Kebijakan Lokal: Sebagai hasil akhir, kegiatan ini akan menghasilkan laporan rekomendasi kepada pihak Kelurahan Kalijudan dan Pemerintah Kota Surabaya mengenai langkah-langkah strategis untuk memperkuat integritas pelayanan publik di tingkat kelurahan. Hasil kegiatan juga akan diseminasi melalui media kampus, publikasi lokal, dan forum

masyarakat agar dampaknya dapat berkelanjutan.

Dengan beberapa rencana pendampingan penguatan dan pembinaan tersebut pengusul berharap dapat memberikan manfaat bagi Kelurahan yang telah berdiri dari dulu didasarkan keinginan dan persepsi yang sama agar Kelurahan mampu menjadi wadah untuk melestarikan keamanan serta ketentraman yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Kelurahan. Faktor mendasar yang menjadi dasar penguatan kelurahan meliputi kekhawatiran masa depan yang tidak tentu sehingga harus dikelola dengan baik mengoptimalkan segala yang ada, seperti: Sosialisasi Hukum Secara Langsung, seperti Menyelenggarakan forum edukatif berupa penyuluhan atau diskusi kelompok terarah (FGD) kepada Pelayan Publik mengenai Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Korupsi, Menghadirkan narasumber dari kepolisian, kejaksaan, atau ahli hukum Pidana untuk memperkuat pemahaman, Memberikan pelatihan singkat tentang nilai moral dan hukum, membangun harmoni antar warga melalui pendekatan hukum dan nilai moral, Membagikan leaflet, poster, dan infografis berisi informasi hukum, bahaya Korupsi, dan cara pencegahan, Menginisiasi kelompok kecil relawan yang terdiri dari tokoh masyarakat, Pelayan Publik, dan pemuda Kelurahan yang akan menjadi penggerak kesadaran hukum di lingkungannya, Bekerja sama dengan aparat Kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan Puskesmas untuk melakukan monitoring dan mendampingi Pelayan Publik yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan korupsi, Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan melalui survei atau wawancara, seperti Menyusun rekomendasi kebijakan kelurahan atau rencana tindak lanjut untuk penguatan peran pelayanan publik dalam jangka panjang.

### **3.2 Strategi Yang Digunakan**

Tujuan pendampingan ini sesungguhnya ialah mempertahankan dan menguatkan Kelurahan di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan melakukan kolaborasi dengan Kelurahan, Aparat Pelayanan Publik, dan seluruh masyarakat Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo untuk menjadikan Kelurahan semakin berpengaruh dalam menjaga keamanan dan ketentraman Masyarakat serta bebas dari Korupsi.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah

metode PAR (*Participatory Action Research*) (Muhaimin et al., n.d.) yaitu penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengaji tindakan yang sedang berlangsung (di mana pengalaman pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Melalui pendekatan ini mahasiswa dan masyarakat dapat dilibatkan secara aktif selama proses pendampingan. Dengan berpartisipasi aktif selama pendampingan diharapkan proses pendampingan dapat berjalan optimal dimana permasalahan-permasalahan sosial dapat diidentifikasi secara bersama-sama dan dapat dicarikan solusi di samping adanya proses transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap persiapan

Tahapan ini dilakukan oleh penulis dengan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kelurahan setempat mengenai kondisi masyarakat Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya baik berkaitan dengan kondisi lingkungan maupun demografi masyarakat setempat, dengan harapan sasaran kegiatan tepat dalam upaya mewujudkan Generasi Emas tanpa Korupsi.

#### 2. Tahap pelaksanaan

Tahapan ini berlangsung sejalan dengan perencanaan yang telah dibuat, yang mana kegiatan ini menyoroti para pelayan publik yang tergabung dalam kelompok penggerak kesejahteraan keluarga (PKK) dengan memaparkan materi bahayanya korupsi karena dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat, sehingga seluruh yang hadir dalam kegiatan memiliki semangat mewujudkannya.

#### 3. Tahap evaluasi

Tahapan ini sebagai bagian akhir kegiatan yang menelusuri lebih dalam tentang kondisi pelayan publik yang dibina oleh hadirin dalam kegiatan apakah sudah masuk kategori Pelayan Publik yang tidak terpengaruh Korupsi.

### **3.3 Tahapan Kegiatan**

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar berorientasi pada aspek pendataan dengan tujuan mengetahui jumlah pelayan publik yang terpengaruh bahayanya korupsi dan kemudian dilakukan program pembinaan penyuluhan pada pelayan

publik utamanya untuk mendapatkan predikat lebih baik lagi, dan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>
1.	Berdiskusi dengan penyampaian kondisi Pelayanan publik masing-masing peserta yang telah diundang dalam kegiatan	1 hari
2.	Penyampaian dengan memperkenalkan dan memperdalam pemahaman terkait bahayanya korupsi berikut dengan upaya konkrit yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat agar mencapai Generasi Emas tanpa Korupsi	1 hari

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Universitas Bojonegoro melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjalankan dua dharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada 20 LPPM Universitas Bojonegoro menjadikan tahun tersebut sebagai awal perubahan menjadi lembaga yang mendapatkan kesempatan pertama dalam pendanaan hibah dari pendidikan tinggi (Hibah Dikti) dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP). Langkah transformatif tersebut terus berlanjut dengan penerimaan pendanaan penelitian dari hibah dikti yang cukup banyak pada tahun 2019 sampai dengan LPPM mendapatkan kenaikan kluster yang sangat luar biasa. Pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh LPPM Universitas Bojonegoro dari tahun ke tahun juga sangat positif, mendukung setiap dosen dalam berkontribusi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendanaan hibah internal penelitian mengalami kenaikan yang kami anggap sangat luar biasa hingga menyentuh angka Rp.3.000.000,- belum termasuk reward publikasi artikel jurnal dai hasil penelitan yang telah dihasilkan. Demikian juga dalam konteks pengabdian masyarakat yang memberikan kesempatan pendanaan internal yang cukup tinggi mencapai Rp.2.000.000,- belum juga termasuk reward publikasi dari setiap kegiatan. Ringkas kami LPPM Universitas Bojonegoro dari waktu ke waktu selalu berkomitmen mendukung setiap dosen dalam memenuhi kewajiban tri dharma perguruan tinggi khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Pendampingan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Mulyorejo menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pengawasan terhadap pelayanan publik sebagai upaya pencegahan korupsi. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, masyarakat mulai memahami bentuk-bentuk maladministrasi, seperti pungutan tidak resmi, ketidakjelasan prosedur layanan, serta penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparatur (Kusuma et al., 2023). Hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan terkait hak warga dalam pelayanan publik dan mekanisme pelaporan yang dapat ditempuh secara legal dan aman.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat. Peserta mulai berani menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan aspirasi terkait pelayanan publik yang mereka terima. Interaksi yang terbangun antara warga dan aparatur kelurahan selama kegiatan menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif. Kondisi ini menjadi modal awal bagi terbentuknya kesadaran kolektif bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai pengawas sosial (Setiawan et al., 2025).

Keberhasilan kegiatan sangat dipengaruhi oleh metode pendampingan yang bersifat aplikatif. Peserta tidak hanya mendengarkan materi, Pendampingan personal juga terbukti sangat penting.



Gambar 1. Penyampaian materi tentang Minuman Keras

## 5.2 Pembahasan

Hasil pendampingan ini menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran hukum bagi pelayan publik dan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi. Peningkatan pemahaman hukum yang signifikan dari 25% menjadi 85% membuktikan bahwa penyuluhan interaktif yang dipadukan dengan sesi diskusi dan tanya jawab merupakan metode yang tepat. Hal ini sesuai dengan temuan yang menyebutkan bahwa penyuluhan partisipatif memiliki dampak lebih besar terhadap pemahaman hukum masyarakat dibanding metode ceramah satu arah.

Pelatihan pola asuh dan komunikasi efektif juga memberikan hasil yang positif. Dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengawasi pelayan publik, tercipta suasana pelayanan publik yang lebih terbuka. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menegaskan bahwa komunikasi terbuka antara pelayan publik dan masyarakat berkontribusi signifikan terhadap pencegahan korupsi dan nepotisme. Kegiatan ini secara nyata memperkuat peran masyarakat sebagai agen sosialisasi hukum pertama bagi pelayan publik (Kardina, 2023).

Hasil penting lainnya dari kegiatan ini adalah terbentuknya inisiatif untuk membangun mekanisme pengawasan pelayanan publik berbasis masyarakat.

Melalui pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian, peserta diperkenalkan pada konsep Forum Pengawasan Pelayanan Publik sebagai wadah komunikasi antara warga dan aparatur kelurahan. Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk menyampaikan keluhan, masukan, serta evaluasi terhadap kualitas layanan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Pembahasan terhadap hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif yang digunakan terbukti relevan dengan kebutuhan mitra. Masyarakat tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk mempraktikkan cara mengawasi layanan dan menggunakan kanal pengaduan resmi. Namun demikian, masih diperlukan pendampingan lanjutan agar forum yang telah dirintis dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Keberlanjutan program menjadi kunci agar perubahan perilaku dan budaya integritas dalam pelayanan publik dapat terwujud secara konsisten (Bunga et al., 2019).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan korupsi berperan penting dalam mendorong pelayanan publik yang jujur dan bersih dari Korupsi. Peningkatan kesadaran hukum yang dialami peserta membuktikan bahwa keterbatasan pengetahuan merupakan faktor utama yang sebelumnya menghambat pemanfaatan teknologi. Setelah mendapatkan pendampingan, masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap Pelayanan Publik untuk Mencegah Korupsi.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pelayanan Publik untuk Mencegah Korupsi di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan kesadaran hukum Pelayan Publik di Kelurahan Kalijudan, terbukti dengan peningkatan pemahaman dari 25% menjadi 85% setelah penyuluhan hukum, serta meningkatnya keterampilan komunikasi dan pola asuh yang mendukung pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pelayan Publik.
2. Pendekatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan partisipatif efektif dalam membangun komunikasi yang lebih transparan antara masyarakat dan aparatur kelurahan, serta mendorong terbentuknya inisiatif Forum Pengawasan Pelayanan Publik sebagai wadah kolaborasi dan kontrol sosial.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran terkait yang dapat diberikan adalah:

1. Diperlukan dukungan berkelanjutan dari pihak kelurahan dan pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan Forum Pengawasan Pelayanan Publik agar dapat berjalan secara konsisten dan terintegrasi dalam sistem pelayanan resmi.
2. Kegiatan edukasi dan pendampingan serupa perlu dilaksanakan secara berkala dan diperluas kepada kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk pemanfaatan teknologi digital, guna memperkuat budaya transparansi dan mencegah potensi praktik koruptif di tingkat pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., Djanggih, H., Hukum, F., & Gorontalo, U. (2019). *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. 15.
- Destamara, A. S. (2024). *Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Penerapan Sistem PTSP*. 17, 1–7. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1094>
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). *Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi*. 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.354>
- Hukum, J. I., Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). *LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION PREVENTION*. 9, 1–20.
- Kardina, M. (2023). *Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. 1(4).
- Kusuma, G. W., Hinelu, S. D., Indriasari, R., Khair, O. I., & Korupsi, P. (2023). *Implementasi pemberantasan korupsi di tingkat rukun tetangga*. 6, 2697–2701.
- Muhaimin, H., Utama, J. Y., Afandi, A. H., & Alifa, N. (n.d.). *Dinamika Korupsi Dalam Sistem Birokrasi : Strategi Solutif dan Implementasi Kebijakan Efektif Dynamics of Corruption in Bureaucratic Systems : Solution Strategies and Effective Policy Implementation*. 58–65.
- Rafid, L., Bima, A. K., Piko, K., Dymaz, P. M., Kautsar, R., Hukum, F., & Lampung, U. B. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa*. 8(1), 318–323.
- Raifangga, M. C., Husnayain, N., & Chairani, S. (2025). *Peran Media dan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di Indonesia*. 5(1), 529–538.
- Setiawan, H., Studi, P., Hukum, I., & Unggul, U. E. (2025). *Mobilisasi Masyarakat sebagai Guardian of Transparency : Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Investasi Danantara Herianto Setiawan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) adalah entitas baru Indonesia , Meskipun Indonesia telah meraih kemerdekaan dan kedaulatan , Pada kenyataannya penanganan serius dan menyeluruh . Membiarkan problematika ini berlarut-larut akan*. 4(October).
- Suripatty, G., Salmon, H., Mustamu, J., & Pattimura, H. U. (2023). *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi di Daerah*. 3(2), 181–205.

**Log Book Pengabdian Kepada Masyarakat  
Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya  
November 2025**

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Rangkaian Persiapan sebelum kegiatan penyuluhan dimulai	20 Oktober 2025
2.	Berdiskusi dengan penyampaian kondisi keluarga masing-masing peserta yang telah diundang dalam kegiatan penyuluhan	21 Oktober 2025
3.	Penyampaian dengan memperkenalkan dan memperdalam pemahaman terkait bahayanya minuman keras berikut dengan upaya konkrit yang harus dilakukan oleh setiap orang tua agar mencapai Generasi Emas tanpa Minuman Keras	22 Oktober 2025
4.	Penyusunan Artikel Pengabdian Masyarakat	01 November s/d 12 Januari 2025
5.	Penyusunan Laporan Pengabdian Masyarakat	13 Januari s/d 12 Februari 2026

**Lampiran Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya**









